



KECAMATAN BENGKALIS

2025

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RANWAL RENJA) TAHUN 2026



Jl. Panglima Minal, Desa Air Putih

IG : kecamatan_bengkalis
FB : Kecamatanbengkalis
YT : Kecamatan Bengkalis





**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN BENGKALIS**

**RENJA PD
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2026
KECAMATAN BENGKALIS**



**BENGKALIS
2025**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Dokumen Renja Kecamatan Bengkalis kabupaten Bengkalis tahun 2026 dapat diselesaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renja Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis tahun 2026. Renja Kecamatan Bengkalis merupakan dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.

Renja Kecamatan Bengkalis tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bengkalis. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026. Selain itu, melalui review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, dokumen ini diharapkan memperjelas kondisi terkini dan tingkat capaian kinerja serta strategi pada setiap unit kerja di Kecamatan Bengkalis yang disertai dengan kejelasan dan hasil dari program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut, maka seluruh aparatur Kecamatan Bengkalis kabupaten Bengkalis berkewajiban untuk dapat melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026.

Demikianlah Rancangan Awal Renja Kecamatan Bengkalis kabupaten Bengkalis Tahun 2026 ini disusun, semoga segala program kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.



Bengkalis, 14 Januari 2025

CAMAT BENGKALIS,

TAUFIK HIDAYAT, S.STP., MPA
PEMBINA TK.I

NIP. 19821205 200212 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAS ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Dasar Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3. Isi-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	34
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	34
3.3. Progran, Kegiatan dan Sub Kegiatan	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	37
BAB V PENUTUP.....	48
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan terbagi atas 3 (tiga), yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ialah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan yang memuat perencanaan setiap tahunnya. Ketiga dokumen tersebut memiliki keterkaitan yang saling berhubungan, satu sama lain. Selain itu, ketiga dokumen tersebut wajib disusun dan dimiliki oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJDP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMD dan Rencana Pembangunan Tahunan bahwa Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Adapun penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi dari Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi dari Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Selanjutnya Renja ini dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan pada tahap berikutnya RKA tersebut akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Penyusunan Renja Kecamatan Bengkalis adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Negara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada kecamatan dan kelurahan dilingkungan Kabupaten Bengkalis;
13. Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor 000.7.2.4 /BAPPEDA-PPEP/851/2025 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Bengkalis Kabupaten Bengkalis, disusun dengan maksud :

- a. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh aparatur Kantor Camat Bengkalis dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan.
- b. Menyediakan suatu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah.
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Kantor Camat Bengkalis sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bengkalis.

- d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Bengkalis dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Bengkalis untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program, kegiatan dan sub kegiatan operasional tahunan.
- f. Mendorong motivasi dan kreasi masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih intens lagi dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Bengkalis adalah : tersusunnya evaluasi perencanaan untuk memberikan arah pada penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Bengkalis. Tersusunnya perencanaan sebagai dasar utama bagi setiap bagian dalam menyusun program kegiatan kedepan sesuai dengan potensi yang ada dan kemampuan dana yang tersedia. Dan tersusunnya perencanaan daerah yang komprehensif, transparansi, akuntabel dan partisipatif selaras dengan Visi dan Misi Rencana Strategis Kantor Camat Bengkalis dan tercermin dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis. Serta memberikan informasi deskripsi kondisi riil Kecamatan Bengkalis beserta potensi yang dimiliki dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Bengkalis, sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bengkalis sebagai pedoman dan arah kerja, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Tahun Anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis telah menganggarkan dana sebesar **Rp. 18.989.203.050,00** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 14.604.391.091,00** atau setara 87.87%, sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Yang terdiri Belanja Tidak Langsung (Belanja pegawai gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS) **Rp. 7.622.757.293,00**. dengan realisasi sebesar **Rp. 6.879.480.272,00** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 11.366.445.757,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 7.724.910.819,00** digunakan untuk membiayai 1 (satu) urusan, 6 (enam) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan baik kegiatan yang bersifat swakelola maupun melalui proses penunjukan langsung dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp.)	
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi
2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	11.070.380.824	9.260.340.296
Perencanaan, Penganggarann dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.084.380	131.448.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.485.960	52.650.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.798.420	78.798.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.800.000	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.622.757.293	6.879.480.272
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.622.757.293	6.879.480.272
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	307.200.000	281.600.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	307.200.000	281.600.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	223.104.000	44.573.444
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	223.104.000	44.573.444
Administrasi Umum Perangkat Daerah	873.317.698	603.982.433
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.619.087	15.294.974
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	129.675.581	116.675.967
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.225.000	83.840.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	118.656.030	86.902.474
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	29.000.000	15.220.000
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	440.142.000	286.049.018
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	705.839.344	388.136.000
Pengadaan Mebel	243.761.000	128.761.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	341.059.344	138.356.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	121.019.000	121.019.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	528.612.694	417.223.389
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	160.951.750	147.237.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	342.667.824	248.634.469

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	24.993.120	21.351.920
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	659.465.415	513.896.758
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.736.526	137.528.878
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.330.000	72.949.200
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	288.000.000	264.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	103.398.889	39.418.680
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.235.450.238	1.476.129.922
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.113.806.447	446.409.920
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.113.806.447	446.409.920
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	454.057.479	362.135.830
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	454.057.479	362.135.830
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tingkat Kecamatan	27.046.572	27.046.172
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	27.046.572	27.046.172
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	640.539.740	640.538.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	640.539.740	640.538.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KELURAHAN	5.421.725.475	3.728.800.373
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	492.323.995	492.323.995
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	492.323.995	492.323.995
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.723.752.666	3.124.242.178
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	593.008.715	339.771.320
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.130.743.951	2.784.470.858

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	205.648.814	112.234.200
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerjasama Antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	205.648.814	112.234.200
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	34.980.000	32.455.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	19.980.000	19.980.000
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	19.980.000	19.980.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.000.000	12.475.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	12.475.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	166.125.000	46.125.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	166.125.000	46.125.000
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20.000.000	-
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	19.500.000	19.500.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	126.625.000	26.625.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	60.541.513	60.540.500
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	60.541.513	60.540.500
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	48.701.513	48.700.500
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	11.840.000	11.840.000
	18.989.203.050	14.604.391.091

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Bengkalis, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Camat Bengkalis tahun 2024. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1. (lampiran):



EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2024
KECAMATAN BENGKALIS
TRIWULAN 4

Sasaran Pembangunan Tahunan :

Hal 1 dari 9

No.	Sasaran RKPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024		Perangka t Daerah Penanggu ng		
					6		7		8		9		10		11		12			13= 9+10+11+12		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
	1.	01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatny a Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah					121.078.580.868,00	-	19.474.106.503,00		11.070.380.824,00		1.664.415.397,00		3.383.894.045,00		3.642.362.683,00		5.110.231.808,00	-	13.800.903.933,00	-	33.275.010.436,00	-	27,48	Kecamatan Bengkulu	
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			59.622.362.868,00	-	295.977.600,00		-	0	30.450.000,00	0	52.350.000,00	0	38.450.000,00	0	92.998.000,00	-	214.248.000,00		510.225.600,00	-	0,86		
		01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Dokumen	59.147.402.868,00	6	125.242.600,00	3 Dokumen	55.485.960,00	1 Dokumen	11.700.000,00	1 Dokumen	23.400.000,00	0	11.700.000,00	1 Dokumen	40.950.000,00	3,00	87.750.000,00	9,00	212.992.600,00	50,00	0,36		
		01.2.01.0006.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	48 dokumen	354.960.000,00	16	145.095.000,00	8 Laporan	80.798.420,00	2 Laporan	18.750.000,00	1 Laporan	28.950.000,00	2	26.750.000,00	3 Dokumen	52.048.000,00	8,00	126.498.000,00	24,00	271.593.000,00	50,00	76,51		
		01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen	120.000.000,00	4	25.640.000,00	2 Laporan	13.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	4,00	25.640.000,00	33,33	21,37		
		01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6 Tahun	47.476.158.000,00	2	14.043.064.383,00	14 Bulan	7.622.757.293,00	3 Bulan	1.316.712.093,00	3 Bulan	2.413.867.862,00	5 Bulan	2.902.233.885,00	1 Bulan	3.977.246.387,00	12,00	10.610.060.227,00	14,00	24.853.124.610,00	100,00	51,93		
		01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.902.000.000,00	-	614.400.000,00		-	0	76.800.000,00	0	51.200.000,00	0	179.200.000,00	0	102.400.000,00	-	409.600.000,00		1.024.000.000,00	-	53,84		

Print By eKONEV - KABUPATEN BENGKALIS

No.	Sasaran RKPD	KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024		Perangka t Daerah Penanggu ng							
									I				II									III				IV		
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)			
	01.2.03.0002.		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pelugas Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	96 orang	1.902.000.000,00	32	614.400.000,00	16 Orang	307.200.000,00	0 -	76.800.000,00	0 Orang	51.200.000,00	0 Orang	179.200.000,00	16 Orang	102.400.000,00	16,00	409.600.000,00	48,00	1.024.000.000,00	50,00	53,84				
	01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			900.000.000,00	-	323.804.800,00		-	0	0,00	0	39.713.444,00	0	4.860.000,00	0	0,00	-	44.573.444,00		368.378.244,00	-	40,93				
	01.2.05.0011.		Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	180 orang	900.000.000,00	60	323.804.800,00	30 Orang	223.104.000,00	0	0,00	5 Orang	39.713.444,00	1 Orang	4.860.000,00	0	0,00	6,00	44.573.444,00	66,00	368.378.244,00	36,67	40,93				
	01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.052.000.000,00	-	1.755.408.230,00		-	0	62.878.112,00	0	201.272.447,00	0	94.949.400,00	0	468.555.352,00	-	827.655.311,00		2.583.063.541,00	-	51,13				
	01.2.06.0001.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	102 Item	180.000.000,00	34	31.455.000,00	0 Paket	17.819.087,00	0 -	1.610.000,00	0 -	8.829.974,00	0 -	4.406.000,00	0 -	10.888.974,00	-	25.734.948,00	34,00	57.189.948,00	33,33	31,77				
	01.2.06.0002.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	180 Item	1.080.000.000,00	60	249.629.600,00	0 Paket	129.675.581,00	0 -	10.709.512,00	0 -	35.257.681,00	0	0,00	0 -	81.418.286,00	-	127.385.479,00	60,00	377.015.079,00	33,33	34,91				
	01.2.06.0004.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Jenis	780.000.000,00	6	234.325.000,00	0 Paket	128.225.000,00	0 -	6.750.000,00	0 -	31.000.000,00	0 -	15.400.000,00	0 -	68.440.000,00	-	121.590.000,00	6,00	355.915.000,00	33,33	45,63				
	01.2.06.0005.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	120 Item	600.000.000,00	39	324.394.625,00	0 Paket	118.656.030,00	0 -	2.965.000,00	0 -	32.987.774,00	0 -	5.325.000,00	0 -	81.577.474,00	-	122.855.248,00	39,00	447.249.873,00	32,50	74,54				
	01.2.06.0006.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Persturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Media	108.000.000,00	4	23.760.000,00	2 Dokumen	29.000.000,00	0	0,00	0 -	5.220.000,00	0	0,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1,00	15.220.000,00	5,00	38.980.000,00	4,17	36,09				
	01.2.06.0009.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	600 Kali	2.100.000.000,00	200	881.844.005,00	130 Laporan	440.142.000,00	30 Laporan	40.843.600,00	20 Laporan	87.977.018,00	20 Laporan	69.818.400,00	0 -	216.230.618,00	70,00	414.869.636,00	270,00	1.296.713.641,00	45,00	61,75				
	01.2.06.0011.		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Jenis	204.000.000,00	2	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	2,00	10.000.000,00	33,33	4,90				
	01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah			1.342.860.000,00	-	836.844.900,00		-	0	0,00	0	388.136.000,00	0	0,00	0	0,00	-	388.136.000,00		1.224.980.900,00	-	91,22				

Provinsi MONEV - KABUPATEN BENGKALIS

No.	Sasaran RKPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung						
								I		II		III		IV											
								9	10	11	12	13= 9+10+11+12	14 = 7 +13	15 = 14/6 x 100%											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 jenis	660.000.000,00	7	230.884.900,00	3 Unit	243.761.000,00	0	0,00	2 Unit	128.761.000,00	0	0,00	0	0,00	2,00	128.761.000,00	9,00	359.645.900,00	75,00	54,49	
		01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24 jenis	682.860.000,00	7	459.706.800,00	1 Unit	341.059.344,00	0	0,00	0 -	138.356.000,00	0	0,00	0	0,00	-	138.356.000,00	7,00	598.062.800,00	29,17	87,58	
		01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	2	146.253.200,00	3 Jenis	121.019.000,00	0 -	0,00	3 Jenis	121.019.000,00	0	0,00	0	0,00	3,00	121.019.000,00		267.272.200,00	-	-	
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.055.200.000,00	-	778.111.181,00		-	0	101.385.192,00	0	86.342.451,00	0	222.591.962,00	0	194.631.427,00	-	604.951.032,00		1.383.062.213,00	-	45,27	
		01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4800 surat	840.000.000,00	1800	299.576.000,00	8 Laporan	160.951.750,00	0 -	39.156.000,00	3 Laporan	27.900.000,00	2 Laporan	91.546.000,00	3 Laporan	55.691.000,00	8,00	214.293.000,00	1.808,00	513.869.000,00	37,67	61,17	
		01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	600%	2.100.000.000,00	112	430.233.741,00	12 Bulan	342.667.824,00	3 Bulan	57.429.192,00	3 Bulan	53.158.051,00	3 Bulan	119.845.962,00	3 Bulan	128.788.507,00	12,00	359.221.712,00	124,00	789.455.453,00	20,67	37,59	
		01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Orang	115.200.000,00	2	48.301.440,00	1 Laporan	24.993.120,00	3 Bulan	4.800.000,00	3 Bulan	5.284.400,00	3 Bulan	11.200.000,00	3 Bulan	10.151.920,00	12,00	31.436.320,00	14,00	79.737.760,00	100,00	69,22	
		01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		-	9	155.505.409,00	11 Unit	176.736.528,00	0	0,00	5 Unit	51.443.361,00	2 Unit	19.767.436,00	2 Unit	117.761.442,00	9,00	188.972.039,00		344.477.448,00	-	-	
		01.2.09.0006.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		-	10	94.580.000,00	55 Unit	91.330.000,00	7 Unit	4.190.000,00	20 Unit	12.150.000,00	6 Unit	12.310.000,00	8 Unit	60.639.200,00	41,00	89.289.200,00		183.869.200,00	-	-	
		01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan yang dilaksanakan	66 Orang	1.728.000.000,00	16	576.000.000,00	12 Bulan	288.000.000,00	3 Bulan	72.000.000,00	3 Bulan	48.000.000,00	3 Bulan	168.000.000,00	2 Bulan	96.000.000,00	11,00	384.000.000,00	27,00	960.000.000,00	40,91	55,56	
		01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	1	410.000,00	1 Unit	103.998.889,00	0 -	0,00	1 Unit	39.418.680,00	0	0,00	0	0,00	1,00	39.418.680,00		39.828.680,00	-	-	

No.	Sasaran RKPD	KODE	urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024	Perangka t Daerah Penanggu ng								
								I				II								III				IV			
								I		II		III		IV						I		II		III		IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 9+10+11+12	14 = 7 +13	15 = 14/6 x 100%	(16)												
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								11.85	9.17	46.65	28.82	35.34	18.89	66.81	36.23	73.99	77.79			36.45	36.14						
Prediksi Kinerja Program								Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah			Berikut Rendah	Berikut Rendah						
1.	Meningkatny a Kepuasan Masyarakat	00.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.050.000.000,00	-	2.415.602.592,00	2.235.450.238,00		126.016.532,00		502.556.970,00		861.506.860,00		141.166.970,00	-	1.631.247.332,00	-	4.046.849.924,00	-	100,00	Kecamatan Bengkulu				
		00.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan		210.000.000,00	-	1.217.610.500,00	-	0	0,00	0	424.990.000,00	0	0,00	0	0,00	-	424.990.000,00		1.642.600.500,00	-	100,00					
		00.02.2.01.00.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	4	1.217.610.500,00	8 Dokumen	0	0,00	5	424.990.000,00	0	0,00	0	0,00	5,00	424.990.000,00		1.642.600.500,00	-	-					
		00.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		1.050.000.000,00	-	1.197.992.092,00	-	0	98.970.360,00	0	77.566.970,00	0	220.968.860,00	0	141.166.970,00	-	538.673.160,00		1.736.665.252,00	-	100,00					
		00.02.2.02.00.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 kegiatan	14	1.197.992.092,00	4 Laporan	1	98.970.360,00	1	77.566.970,00	1	220.968.860,00	1	141.166.970,00	4,00	538.673.160,00	18,00	1.736.665.252,00	30,00	100,00					
		00.02.2.03.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		-	-	-	-	0	27.046.172,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	27.046.172,00		27.046.172,00	-	-					
		00.02.2.03.00.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	-	-	1 Kegiatan	27.046.172,00	1 Kegiatan	27.046.172,00	0	0,00	0	0,00	0	1,00	27.046.172,00		27.046.172,00	-	-					
		00.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diimpahkan kepada Camat		-	-	-	-	0	0,00	0	0,00	0	640.538.000,00	0	0,00	-	640.538.000,00		640.538.000,00	-	-					

No.	Sasaran RKPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024		Perangka t Daerah Penang ung	
								I		II		III		IV				14 = 7 +13			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 9+10+11+12	14 = 7 +13	15 = 14/6 x 100%	16						
		00.02.2.04.00.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	-	-	1 Kegiatan	640.539.740,00	0	0,00	0	0,00	1 Kegiatan	640.538.000,00	0	0,00	1,00	640.538.000,00	-	-	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								30,75	30,45	29,47	13,81	41,44	37,17	19,94	7,77	89,89	84,54	32,16	26,00		
Prediksi Kinerja Program								Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah	Berikut Rendah	Tinggi	Tinggi	Berikut Rendah	Berikut Rendah		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	00.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			38.400.000.000,00	-	10.176.915.833,00	5.168.488.080,00		33.713.000,00		933.230.810,00	1.797.997,368,00	1.591.031,885,00	-	4.355.972.863,00	-	14.532.888.696,00	-	37,85	Kecamatan Bengkalis
	00.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			6.000.000.000,00	-	914.216.480,00	-	0	0,00	0	20.000.000,00	131.980.000,00	360.343.995,00	-	512.323.995,00		1426.540.475,00	-	23,78	
	00.03.2.01.00.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36 kegiatan	6.000.000.000,00	12	914.216.480,00	492.323.995,00	0	0,00	0	20.000.000,00	131.980.000,00	360.343.995,00	1,00	512.323.995,00	13,00	1426.540.475,00	36,11	23,78	
	00.03.2.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN			32.520.000.000,00	-	9.262.699.353,00	-	0	0,00	0	903.220.810,00	1.599.793,368,00	1.184.677,490,00	-	3.687.691.468,00		12.950.390.821,00	-	39,82	
	00.03.2.02.00.02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 kelurahan	14.019.120.000,00	6	2.422.567.510,00	339.771.320,00	0	0,00	3 Unit	339.771.320,00	0	0,00	0	339.771.320,00	9,00	2.762.338.830,00	50,00	19,70	
	00.03.2.02.00.03	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 kelurahan	18.380.880.000,00	6	6.840.131.843,00	4.130.743.951,00	0	0,00	1 Pokmas /Ormas	563.449.290,00	1.599.793,368,00	1.184.677,490,00	3,00	3.347.920.148,00	9,00	10.188.051.991,00	50,00	55,43	
	00.03.2.06.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			-	-	-	-	0	33.713.000,00	0	10.010.200,00	66.224.000,00	46.010.200,00	-	155.957.400,00		155.957.400,00	-	-	
	00.03.2.06.00.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat	1 Kegiatan	-	-	-	205.648.814,00	0	33.713.000,00	0	10.010.200,00	66.224.000,00	46.010.200,00	1,00	155.957.400,00		155.957.400,00	-	-	

No.	Sasaran RKPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung		
											I				II		III								IV	
											9		10		11		12									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)	
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											4,25	4,10	36,35	30,64	30,75	24,48	85,50	31,06	80,50	86,22			82,40	24,73		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	00.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		240.000.000,00	-	34.988.000,00		34.980.000,00		0,00		12.475.000,00		0,00		19.980.000,00	-	32.455.000,00	-	67.443.000,00	-	28,10	Kecamatan Bengkalis		
2.	Meningkatnya Keamanan Dan Ketertiban	00.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		-	-	15.000.000,00		-	0	0,00	0	12.475.000,00	0	0,00	0	0,00	-	12.475.000,00		27.475.000,00	-	-			
		00.04.2.01.00.01	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		-	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	0	0,00	1	12.475.000,00	0	0,00	0	0,00	(1,00)	12.475.000,00		27.475.000,00	-	-			
		00.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		240.000.000,00	-	19.988.000,00		-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	19.980.000,00	-	19.980.000,00		39.968.000,00	-	16,65			
		00.04.2.02.00.01	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	144 kali	240.000.000,00	24	19.988.000,00	1	19.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	19.980.000,00	1,00	19.980.000,00	25,00	39.968.000,00	17,36	16,65			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	41,89	41,88	0,00	0,00	80,00	80,00	91,89	91,88			30,97	8,33		
Predikat Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No.	Sasaran RKPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024	Perangka t Daerah Penangng ung						
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13= 9+10+11+12		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-		00.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			240.000.000,00	-	631.475.500,00		166.125.000,00		0,00		26.625.000,00		19.500.000,00		0,00	-	46.125.000,00	-	677.600.500,00	-	100,00	Kecamatan Bengkalis
		00.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah			240.000.000,00	-	631.475.500,00	-	0	0	0,00	0	26.625.000,00	0	19.500.000,00	0	0,00	-	46.125.000,00		677.600.500,00	-	100,00	
		00.05.2.01.00.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan	48 kegiatan	120.000.000,00	4	370.798.500,00	1 Kegiatan	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	4,00	370.798.500,00	8.33	100,00	
		00.05.2.01.00.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan yang diadakan dalam Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		-	-	-	1 Kegiatan	19.500.000,00	0	0,00	0	0,00	1 Kegiatan	19.500.000,00	0	0,00	1,00	19.500.000,00		19.500.000,00	-	-	
		00.05.2.01.00.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 kali	120.000.000,00	27	260.677.000,00	3 Dokumen	126.625.000,00	0	0,00	0	26.625.000,00	0	0,00	0	0,00	-	26.625.000,00	27,00	287.302.000,00	100,00	100,00	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	7,01	7,01	33,33	33,33	0,00	0,00	40,34	40,34			31,99	66,67	
Predikat Kinerja Program											Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk			Sangat Buruk	Buruk	
-		00.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			360.000.000,00	-	110.397.200,00		60.541.513,00		0,00		48.700.500,00		0,00		11.840.000,00	-	60.540.500,00	-	170.937.700,00	-	47,48	Kecamatan Bengkalis
		00.06.2.01.	Facilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			360.000.000,00	-	110.397.200,00		-	0	0,00	0	48.700.500,00	0	0,00	0	11.840.000,00	-	60.540.500,00		170.937.700,00	-	47,48	
		00.06.2.01.00.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24 kali	240.000.000,00	59	86.717.000,00	1 Dokumen	48.701.513,00	0	0,00	1 Dokumen	48.700.500,00	0	0,00	0	0,00	1,00	48.700.500,00	60,00	135.417.500,00	100,00	56,42	

No.	Sasaran RKPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENUJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024	Perangka t Daerah Penangg ung
								I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 9+10+11+12	14 = 7 +13	15 = 14/6 x 100%	(16)
					K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	

*) Diisi oleh Kepala Bappeda



DAFTAR
Bengkalis, - Maret - 2025
Kepala Bappeda
TAUFIK HADYAT, S.S.P, MPA
Pembina Tk. I
NIP. 19821205 200212 1 001.

Dievaluasi,
Bengkalis, - Maret - 2025
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah

RINTO, SE, M.Si,
Pembina Tk. I
NIP. 19810601 200903 1 002

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan merupakan suatu perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, yang dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah untuk menangani sebagian urusan kewilayahan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dalam pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang meliputi bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban, Kesejahteraan Sosial dan Budaya serta Pelayanan Umum.

Kecamatan Bengkalis merupakan OPD yang langsung berhubungan dengan masyarakat, artinya bahwa tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah peningkatan pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Bengkalis, baik yang terkait dengan pelayanan non perizinan, administrasi persuratan dan lain-lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Pada tahun 2024, Kecamatan Bengkalis telah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Kerja (RENJA), laporan evaluasi Renja semesteran, laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan, laporan keuangan, profil kecamatan.

Pada tabel 2.2 disajikan terkait analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

NO	INDIKATOR	SATUAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat	%			88	89	90	91	91,62	91,62	94	95,5	
2	Persentase Kelurahan/ Desa Dengan Kinerja Baik	%			45,16%	75%	80%	83%	80%	80%			
3	Persentase Penurunan Gangguan KAMTIBMAS	%			80%	82%	85%	87%	85%	85%			
4	Predikat akuntabilitas kinerja	Nilai			BB	BB	BB	BB	BB	BB			

Tugas Pokok Kecamatan Bengkalis adalah:

1. Melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.
2. Menyelenggaraan tugas Umum Pemerintah meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

3. Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang belum dapat dilaksanakan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan; dan Kewenangan lain yang di limpahkan.

Semua Pegawai Kantor Camat Bengkalis diharapkan mengerti tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Bengkalis, sesuai Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas pada Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kedisiplinan pegawai Kantor Camat Bengkalis Tahun 2024, tingkat kehadiran pegawai Kantor Camat Bengkalis sangat baik yakni sebesar **98%**. Kondisi ini merupakan implikasi dari penerapan kebijakan *Reward and Punishment* di Kecamatan Bengkalis, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1 *Reward* (Penghargaan)

Selaku OPD yang menjalankan tugas dan fungsi Pelayanan memiliki beban kerja dan tanggung jawab yang besar kepada masyarakat. Sebagai penghargaan bagi pegawai negeri/staf lingkup Kecamatan Bengkalis, selain diberikan tambahan penghasilan (insentif) sesuai ketetapan pemerintah juga diberikan tunjangan kinerja aparatur perencana berdasarkan kondisi kerja sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 20 Tahun 2021.

2.2.2 *Punishment* (Sanksi)

Selain bentuk penghargaan diatas, Kecamatan Bengkalis juga menetapkan *punishment* (sanksi) bagi seluruh pegawai yang tidak disiplin berupa pemotongan insentif serta teguran oleh atasan baik secara lisan maupun tulisan. Disamping sanksi tersebut di atas, bagi pegawai yang

kurang disiplin juga mendapatkan sanksi normatif dari pimpinan berupa pengurangan keterlibatan dalam beberapa aktifitas dan kegiatan Kantor Camat Bengkalis, namun tetap dilakukan pendekatan persuasif kepada yang bersangkutan sebagai bentuk pembinaan secara langsung.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuannya, SKPD Kecamatan Bengkalis telah melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. Beberapa program kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Mencermati perkembangan kontemporer dalam masyarakat Kecamatan Bengkalis, dapat dipetakan isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan *stakeholder* terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rencana strategis sehingga diperoleh output yang lebih aspiratif,
2. Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir yang dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu sebagai modal *database* dalam menyusun perencanaan pembangunan. Untuk mencapai hal ini maka dibutuhkan personil yang dinamis dalam melakukan *collecting data*, rekapitulasi data dan penyusunan *database*.
3. Pemerataan pembangunan fisik sekaligus membuka lapangan pekerjaan dengan memberdayakan warga lokal.
4. Belum terpenuhinya dengan baik standard pelayanan minimal dan standard opsional prosedur di setiap organisasi perangkat daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Kantor Camat Bengkalis telah sejalan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Bengkalis, adapun perubahan yang terjadi hanya pada besaran pagu anggaran dari masing-masing program dan kegiatan.

Adapun terjadinya perbedaan pagu anggaran tersebut terjadi disebabkan oleh perubahan standarisasi dari harga barang dan jasa serta honorarium kegiatan sehingga perlu dilakukan perubahan dari item masing-masing kegiatan yang telah direncanakan. Dalam penyusunan rencana kerja OPD Tahun 2026 proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan SKPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Penelaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Kecamatan Bengkalis yang tercantum pada RKPD 2026 dan selanjutnya menyesuaikan dengan regulasi terbaru terhadap program dan kegiatan untuk tahun 2026;
2. Membuat perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dengan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Penyajian data dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bengkalis yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis.
4. Memastikan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Bengkalis yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD tahun 2026;
5. Mengidentifikasi kesesuaian jenis program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bengkalis antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Merumuskan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bengkalis berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan.

**Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Bengkulu
Perangkat Daerah: Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu**

Kode					Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan					Hasil Analisa Kebutuhan				
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi Ouput Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01				KECAMATAN				16.618.447.895					-
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintah			9.615.394.510					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dok Perencanaan dan Evaluasi			83.887.000					
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, dan Renja Perubahan yang Disusun		3 Dokumen	23.485.000					
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang Tersusun ; Jumlah Tenaga Operator Komputer		8 Dokumen / 1 Orang	49.532.000					
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil dan Monografi yang di Disusun		2 Dokumen	10.870.000					

7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan			7.756.776.729					
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan		1 Tahun	7.756.776.729					
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				-					
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah			307.200.000					
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen RKBMD yang Disediakan			-					
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Tenaga Pengamanan Barang Milik Daerah		16 Orang	307.200.000					
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.000.000					
7	01	01	2.05	0001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN dan Honorer yang Mengikuti Bimtek		35 Orang	30.000.000					
7	01	01	2.06		Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah			427.857.885					
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item Belanja Listrik dan Penerangan Kantor		17 Item	8.612.579					
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Item Belanja Alat Tulis Kantor, Alat Pembersih dan Bahan Pembersih yang Disediakan		30 Item	53.064.497					

7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan		3 Jenis	59.500.000					
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Item Cetak dan Penggandaan		7 Item	60.000.000					
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Tabloid, Majalah dan Surat Kabar yang Dilayani		1 Media	12.000.000					
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang Dilayani			-					
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi ASN yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi		100 Kali	224.680.809					
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 Tahun	10.000.000					
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah			50.000.000					
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional /Lapangan yang Disediakan			25.000.000					
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang Disediakan		2 Jenis	5.000.000					
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan			-					
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		4 Jenis	15.000.000					

7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Disediakan			5.000.000					
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				436.185.008					
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Ditindaklanjuti ; Jumlah Tenaga Administrasi yang Disediakan		800 Surat / 8 Orang	134.400.000					
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Kebutuhan Listrik dan Internet Kantor		100%	279.067.824					
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Sopir Kantor yang Disediakan		1 Orang	22.717.184					
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah			523.487.888					
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dilakukan Perawatan		20 Unit	194.480.000					
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara		55 Unit	-					
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Petugas yang Merawat ; Jumlah Gedung yang Dipelihara		15 Orang	288.000.000					
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Fasilitas Umum yang Dipelihara			41.007.888					
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat			1.209.408.739					
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Pembangunan			94.503.844					

7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				-					
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Efektifitas Pemerintahan Kecamatan		7 Kegiatan	94.503.844					
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Persentase Terlaksananya Pelayanan Kedinasan			453.528.501					
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Dilaksanakan		2 Kegiatan	453.528.501					
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				34.309.991					
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Terkait yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Jumlah Usulan Musrenbang		1 Kegiatan	34.309.991					
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat				627.066.403					
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		1 Kegiatan	627.066.403					
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Ketepenuhan Kegiatan Pemberdayaan Desa			5.690.203.366					
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				455.755.482					
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Kegiatan	455.755.482					
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terwujudnya Pemberdayaan Kelurahan			5.038.800.000					

7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				-					
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dilaksanakan		3 Kelurahan	600.000.000					
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Dilaksanakan		3 Kelurahan	4.438.800.000					
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan				-					
7	01	03	2.03		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan				-					
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				-					
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				195.647.884					
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama Antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		1 Kegiatan	195.647.884					
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				17.795.000					
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				10.560.000					
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Frekuensi Dilaksananya Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan			10.560.000					

7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				7.235.000					
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Frekuensi Pelaksanaan Operasi Pekat yang Dilaksanakan		1 Kegiatan	7.235.000					
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			-					
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				28.985.000					
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				28.985.000					
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan		1 Kegiatan	10.815.000					
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Partisipan yang Memeriahkan Rangkaian Acara dan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional		1 Kegiatan	15.000.000					
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Frekuensi Pemantauan & Penyelesaian Isu-Isu Trantibum di Wilayah Kecamatan Bengkalis		3 Kegiatan	3.170.000					
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				56.661.280					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				56.661.280					
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Frekuensi Dilakukannya Pembinaan Administrasi Desa; Jumlah Desa Berkinerja Baik		31 Desa/ Kelurahan	36.841.740					

7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				-					
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Frekuensi Dilakukannya Pembinaan APB Desa		31 Desa/ Kelurahan	19.819.540					



Bengkalis, 14 Januari 2025
CAMAT BENGKALIS

TAUFIK HIDAYAT, S.STP., MPA
Pembina TK.I
NIP. 19821205 200212 1 001

1.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun SKPD lainnya.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan serta sub kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Kecamatan Bengkalis sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. Rancangan rencana kerja Kecamatan Bengkalis didiskusikan dalam pembahasan Forum SKPD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dalam menyusun perencanaan harus mengacu pada visi dan misi kepala daerah tahun 2021-2026 yang telah tertuang sebagaimana yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dengan visi, yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera Serta Unggul di Indonesia”***. Berdasarkan visi tersebut maka dapat dirumuskan dengan 3 (tiga) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter;
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Penjabaran dari visi dan misi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) agenda prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Daerah yang efektif berkeadilan dan tepat sasaran;

2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Melayani dan Inovatif;
3. Peningkatan Aksesibilitas dan Penataan Infrastruktur dan Kawasan Pemukiman;
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lestari;
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
6. Peningkatan Kualitas Pemahaman Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal;
7. Sinergitas kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Stakeholder lainnya.

Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bengkalis yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Kecamatan Bengkalis. Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Integritas, Dinamis, dan Masyarakat Berkarakter Dengan Penguatan Nilai Agama	Terciptanya Tatakelola Pemerintahan Baik, Bersih dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	95,5%

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 tertuang pada tabel 4.1 Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026 ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kantor Camat Bengkalis tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2026 sebagai acuan bagi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja tahun 2026 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang ada pada Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan rapat koordinasi dan observasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya.

Rencana Kerja yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan, output, outcome, pagu indikatif, serta sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tabel dibawah ini:

Table. 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Rencana 2027

Kode					Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rancangan Awal Renja Tahun 2026			Pagu Tambahan Hasil Pembahasan FDP 2026	Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi Ouput Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01				KECAMATAN				20.773.346.228	16.618.447.895	(4.154.898.333)				17.661.179.256
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintah			12.363.556.337	9.615.394.510	(2.748.161.827)				10.030.019.715
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dok Perencanaan dan Evaluasi			181.435.880	83.887.000	(97.548.880)				129.883.020
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, dan Renja Perubahan yang Disusun		3 Dokumen	74.685.960	23.485.000	(51.200.960)	APBD		3 Dokumen	60.366.000
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang Tersusun ; Jumlah Tenaga Operator Komputer		8 Dokumen / 1 Orang	91.124.920	49.532.000	(41.592.920)	APBD		8 Dokumen / 1 Orang	53.892.020
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil dan Monografi yang di Disusun		2 Dokumen	15.625.000	10.870.000	(4.755.000)	APBD		2 Dokumen	15.625.000

7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan			9.295.976.400	7.756.776.729	(1.539.199.671)				7.488.012.712
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan		1 Tahun	9.280.794.400	7.756.776.729	(1.524.017.671)	APBD		1 Tahun	7.477.830.712
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD				15.182.000	-	(15.182.000)	APBD			10.182.000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah			307.200.000	307.200.000	-				307.200.000
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen RKBMD yang Disediakan			-	-	-	APBD			-
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Tenaga Pengamanan Barang Milik Daerah		16 Orang	307.200.000	307.200.000	-	APBD		16 Orang	307.200.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				223.104.000	30.000.000	(193.104.000)				29.700.000
7	01	01	2.05	0001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN dan Honorer yang Mengikuti Bimtek		35 Orang	223.104.000	30.000.000	(193.104.000)	APBD		35 Orang	29.700.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah			882.941.578	427.857.885	(455.083.693)				641.705.108
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item Belanja Listrik dan Penerangan Kantor		17 Item	24.619.087	8.612.579	(16.006.508)	APBD		17 Item	17.619.087
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Item Belanja Alat Tulis Kantor, Alat Pembersih dan Bahan Pembersih yang Disediakan		30 Item	137.621.991	53.064.497	(84.557.494)	APBD		30 Item	129.621.991

7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan		3 Jenis	137.750.000	59.500.000	(78.250.000)	APBD		3 Jenis	131.560.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Item Cetak dan Penggandaan		7 Item	135.450.500	60.000.000	(75.450.500)	APBD		2 Item	123.486.030
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Tabloid, Majalah dan Surat Kabar yang Dilayani		1 Media	27.000.000	12.000.000	(15.000.000)	APBD		1 Media	27.000.000
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang Dilayani			-	-	-	APBD			-
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi ASN yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi		100 Kali	400.500.000	224.680.809	(175.819.191)	APBD		100 Kali	202.418.000
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 Tahun	20.000.000	10.000.000	(10.000.000)	APBD		1 Tahun	10.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah			171.000.000	50.000.000	(121.000.000)				247.320.396
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional /Lapangan yang Disediakan			40.000.000	25.000.000	(15.000.000)	APBD			-
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang Disediakan		2 Jenis	30.000.000	5.000.000	(25.000.000)	APBD		2 Jenis	39.500.000
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan			-	-	-	APBD			
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan		4 Jenis	49.000.000	15.000.000	(34.000.000)	APBD		4 Jenis	207.820.396
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Disediakan			52.000.000	5.000.000	(47.000.000)	APBD			-

7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				531.668.479	436.185.008	(95.483.471)				464.548.479
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Ditindaklanjuti ; Jumlah Tenaga Administrasi yang Disediakan		800 Surat / 8 Orang	160.487.535	134.400.000	(26.087.535)	APBD		800 Surat / 8 Orang	160.487.535
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Kebutuhan Listrik dan Internet Kantor		100%	342.667.824	279.067.824	(63.600.000)	APBD		100%	279.067.824
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Sopir Kantor yang Disediakan		1 Orang	28.513.120	22.717.184	(5.795.936)	APBD		1 Orang	24.993.120
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah			770.230.000	523.487.888	(246.742.112)				721.650.000
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dilakukan Perawatan		20 Unit	216.480.000	194.480.000	(22.000.000)	APBD		20 Unit	194.480.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara		55 Unit	-	-	-	APBD		55 Unit	89.170.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Petugas yang Merawat ; Jumlah Gedung yang Dipelihara		15 Orang	288.000.000	288.000.000	-	APBD		15 Orang	288.000.000
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Fasilitas Umum yang Dipelihara			265.750.000	41.007.888	(224.742.112)	APBD			150.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat			2.011.673.978	1.209.408.739	(802.265.239)				2.045.214.173
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Pembangunan			826.677.467	94.503.844	(732.173.623)				896.579.278

7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			-	-	-	APBD			-
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Efektifitas Pemerintahan Kecamatan	7 Kegiatan	826.677.467	94.503.844	(732.173.623)	APBD		7 Kegiatan	896.579.278
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Persentase Terlaksananya Pelayanan Kedinasan		471.500.000	453.528.501	(17.971.499)				453.528.501
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	471.500.000	453.528.501	(17.971.499)	APBD		2 Kegiatan	453.528.501
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			43.039.991	34.309.991	(8.730.000)				43.039.991
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Terkait yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Jumlah Usulan Musrenbang	1 Kegiatan	43.039.991	34.309.991	(8.730.000)	APBD		1 Kegiatan	43.039.991
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat			670.456.520	627.066.403	(43.390.117)				652.066.403
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Kegiatan	670.456.520	627.066.403	(43.390.117)	APBD		1 Kegiatan	652.066.403
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Ketepenuhan Kegiatan Pemberdayaan Desa		6.106.564.704	5.690.203.366	(416.361.338)				5.331.403.366
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			482.755.482	455.755.482	(27.000.000)				475.755.482
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	482.755.482	455.755.482	(27.000.000)	APBD		1 Kegiatan	475.755.482

7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terwujudnya Pemberdayaan Kelurahan			5.350.000.000	5.038.800.000	(311.200.000)				4.650.000.000
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			-	-	-	APBD				-
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dilaksanakan		3 Kelurahan	600.000.000	600.000.000	-	APBD		3 Kelurahan	-
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Dilaksanakan		3 Kelurahan	4.750.000.000	4.438.800.000	(311.200.000)	APBD		3 Kelurahan	4.650.000.000
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan			-	-	-	APBD				-
7	01	03	2.03		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan			-	-	-					-
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			-	-	-	DAU/APB D				-
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				273.809.222	195.647.884	(78.161.338)				205.647.884
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama Antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		1 Kegiatan	273.809.222	195.647.884	(78.161.338)	APBD		1 Kegiatan	205.647.884
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				40.065.927	17.795.000	(22.270.927)				34.980.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				20.065.927	10.560.000	(9.505.927)				19.980.000

7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Frekuensi Dilaksananya Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan			20.065.927	10.560.000	(9.505.927)	APBD			19.980.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				20.000.000	7.235.000	(12.765.000)				15.000.000
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Frekuensi Pelaksanaan Operasi Pekat yang Dilaksanakan		1 Kegiatan	20.000.000	7.235.000	(12.765.000)	APBD		1 Kegiatan	15.000.000
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			-	-	-	APBD			-
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				147.711.003	28.985.000	(118.726.003)				128.960.722
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				147.711.003	28.985.000	(118.726.003)				128.960.722
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan		1 Kegiatan	20.000.000	10.815.000	(9.185.000)	APBD		1 Kegiatan	20.000.000
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Partisipan yang Memeriahkan Rangkaian Acara dan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional		1 Kegiatan	112.171.003	15.000.000	(97.171.003)	APBD		1 Kegiatan	103.420.722
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Frekuensi Pemantauan & Penyelesaian Isu-Isu Trantibum di Wilayah Kecamatan Bengkalis		3 Kegiatan	15.540.000	3.170.000	(12.370.000)	APBD		3 Kegiatan	5.540.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				103.774.279	56.661.280	(47.112.999)				90.601.280

7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				103.774.279	56.661.280	(47.112.999)				90.601.280
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Frekuensi Dilakukannya Pembinaan Administrasi Desa; Jumlah Desa Berkinerja Baik		31 Desa/ Kelurahan	63.781.740	36.841.740	(26.940.000)	APBD		31 Desa/ Kelurahan	59.781.740
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				-	-	-	APBD			-
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Frekuensi Dilakukannya Pembinaan APB Desa		31 Desa/ Kelurahan	39.992.539	19.819.540	(20.172.999)	APBD		31 Desa/ Kelurahan	30.819.540


Bengkalis, 14 Januari 2025
CAMAT BENGKALIS

TAUFIK HIDAYAT, S.STP., MPA
Pembina TK.I
NIP. 19821205 200212 1 001

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun. Renja ini disusun dengan koordinasi antar Camat, Sekretaris, Seksi dan Kasubbag.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2026 yang mengacu pada penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2026. Rancangan Awal Rencana Kerja ini juga sebagai langkah awal kebijakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis periode tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Bengkalis periode tahun 2025-2029.

Demikianlah Rencana Kerja Kantor Camat Bengkalis ini disusun dengan harapan dapat memberikan pedoman dan gambaran nyata dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dan kontribusi yang positif dalam menyusun program dan kegiatan serta sub kegiatan tahun 2026.

**Bengkalis, 14 Januari 2025**
CAMAT BENGKALIS
TAUFIK HIDAYAT, S.STP., MPA
Pembina TK.I
NIP. 19821205 200212 1 001

Pemetaan

Program / Kegiatan Renstra Kecamatan Bengkalis Tahun 2025 terhadap
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pemutakhiran Permendagri No. 90 Tahun 2019
(KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021)

KECAMATAN BENGKALIS

Bidang Urusan Pemerintahan	Renstra PD Untuk Tahun 2024							Pemutakhiran Kepmendagri 050-5889 2021								Bidang Urusan Pemerintahan		
	Kode		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Satuan	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Kegiatan	Program	Kode					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14	
URUSAN KEWILAYAH	7												7				URUSAN KEWILAYAH	
KECAMATAN BENGKALIS	7	01											7	01			KECAMATAN BENGKALIS	
	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7	01	01			
	7	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7	01	01	201		
	7	01	01	201	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7	01	01	201	01	
									Dokumen	Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
									Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD							
	7	01	01	201	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Perencanaan program dan kegiatan perangkat	Dokumen	Laporan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar		7	01	01	201	06

[illegible]

	7	01	01	205	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan dalam pelaksanaan disiplin	Bulan	orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			7	01	01	205	11	
	7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah							Administrasi Umum Perangkat Daerah		7	01	01	206		
	7	01	01	206	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Item	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7	01	01	206	01	
	7	01	01	206	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	Item	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7	01	01	206	02	
	7	01	01	206	04		Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	Item	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	Penyediaan Logistik Kantor			7	01	01	206	04	
	7	01	01	206	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	Item	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			7	01	01	206	05	
	7	01	01	206	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Item	Paket	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7	01	01	206	06	
	7	01	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Orang	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu			7	01	01	2.06	08	
	7	01	01	206	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			7	01	01	206	09	

	7	01	01	206	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Item	Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			7	01	01	206	11	
	7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7	01	01	208		
	7	01	01	208	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar dan masuk yang dilayani	Lembar	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			7	01	01	208	01	
	7	01	01	208	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan listrik air dan komunikasi	%	Laporan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			7	01	01	208	02	
	7	01	01	208	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa sopir kantor	Orang	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			7	01	01	208	04	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7	01	01	2.09		
	7	01	01	209	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas roda 4 yang diurus izinya ,perawatan dan oprasional dalam satu tahun	Unit	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			7	01	01	209	02	
	7	01	01	2.09	09		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah tenaga kebersihan kantor	Orang	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			7	01	01	2.09	09	

	7	01	01	2.09	10		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	Unit	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			7	01	01	2.09	10	
	7	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah		7	01	01	207		
	7	01	01	207	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan			7	01	01	207	02	
	7	01	01	207	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel			7	01	01	207	05	
	7	01	01	207	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			7	01	01	207	10	
	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7	01	02			
	7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		7	01	02	201		
	7	01	02	201	01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah peserta musrenbang tingkat Kecamatan	Orang	Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			7	01	02	201	01	
	7	01	02	201	02		Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di			7	01	02	201	02	

									tingkat kecamatan				Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	tingkat Kecamatan										
															Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		7	01	03	206				
												Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Keluarga	7	01	03	206	01			
												Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		Keluarga	7	01	03	206	04			
												Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Keluarga	7	01	03	206	06			

											Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Keluarga	7	01	03	206	07	
											Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Keluarga	7	01	03	206	08	
	7	01	02	202			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			7	01	02	202	
	7	01	02	202	03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan	Orang	Dokumen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	7	01	02	202	03	
	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		7	01	03		

	7	01	03	201			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			7	01	03	201		
	7	01	03	201	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Kegiatan	Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7	01	03	201	03	
	7	01	03	202			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7	01	03	202		
	7	01	03	202	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lemba ga Kemas yarakatan	Lembag a Kemas yarakata n	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7	01	03	202	01	
	7	01	03	202	02		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan				7	01	03	202	02	
	7	01	03	202	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7	01	03	202	03	
	7	01	03	202	04		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Lapora n	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan				7	01	03	202	04	

	7	01	03	203			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan					Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan		7	01	03	2.03		
	7	01	03	203	01		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		7	01	03	2.03	01	
	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7	01	05			
	7	01	05	201			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		7	01	05	201		
	7	01	05	201	02		Fasilitasi , koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah desa dalam pembinaan	Desa	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi , koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		7	01	05	201	02	
	7	01	05	201	03		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		7	01	05	201	03	
	7	01	05	201	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah desa dalam pembinaan bersama Forum	Desa	Orang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		7	01	05	201	08	

	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7	01	06			
	7	01	06	201			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		7	01	06	201		
	7	01	06	201	02			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa dengan tertib administrasi sesuai standar dan berkinerja baik	Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		7	01	06	201	02	
	7	01	06	201	03			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Dokumen	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		7	01	06	201	03	
	7	01	06	201	16			Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa		Dokumen	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa		7	01	06	201	16	
	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7	01	04			
	7	01	04	2.02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7	01	04	2.02		

	7	01	04	2.02	01		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah desa terpantau Keamanan dan ketertiban	Desa	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			7	01	04	2.02	01	
	7	01	04	201			Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum					Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum			7	01	04	201		
	7	01	04	201	01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kegiatan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			7	01	04	201	01	
	7	01	04	201	02		Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah jenis kegiatan yang dilaksanakan	Jenis	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat			7	01	04	201	02	



Bengkalis, 14 Januari 2025
CAMAT BENGKALIS

TAUFIK HIDAYAT, S.STP., MPA
Pembina TK.I
NIP. 19821205 200212 1 001